



## **PANGGUNG SEJARAH TERBENTUKNYA KABUPATEN PASANGKAYU: SEBUAH STUDI PUSTAKA**

**Rahmadi U**

Program studi Pendidikan Bahasa Indonesia, STKIP Tomakaka Tiwikrama

Email: [madhiusman@gmail.com](mailto:madhiusman@gmail.com)

Diterima: 1/4/2026; Direvisi: 10/4/2026; Diterbitkan: 13/4/2026

### **ABSTRAK**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji panggung sejarah terbentuknya Kabupaten Pasangkayu melalui pendekatan studi pustaka. Fokus utama penelitian adalah menelusuri dinamika historis, sosial, politik, dan administratif yang melatarbelakangi pembentukan wilayah tersebut sebagai daerah otonom. Penelitian ini adalah studi pustaka (*library research*) yang mengumpulkan dan menganalisis berbagai sumber relevan yang mencakup catatan sejarah, dokumen pemerintah, jurnal ilmiah, serta arsip terkait proses pemekaran wilayah. Hasil kajian menunjukkan bahwa terbentuknya Kabupaten Pasangkayu tidak terlepas dari aspirasi masyarakat lokal yang menginginkan peningkatan pelayanan publik, percepatan pembangunan, serta penguatan identitas daerah. Selain itu, faktor geografis, potensi sumber daya alam, dan pertimbangan strategis pemerintah turut menjadi dasar penting dalam proses pemekaran dari wilayah induknya. Proses ini melalui tahapan panjang, mulai dari wacana pemekaran, perjuangan administratif, hingga penetapan resmi oleh pemerintah pusat. Pembentukan Kabupaten Pasangkayu merupakan hasil dari interaksi kompleks antara faktor historis, sosial, dan kebijakan politik yang berkembang pada masanya. Penelitian ini diharapkan berkontribusi dalam memperkaya studi terkait sejarah lokal serta menjadi referensi bagi penelitian berikutnya terkait dinamika pemekaran wilayah di Indonesia.

**Kata kunci:** *Sejarah Lokal, Pemekaran Wilayah, Kabupaten Pasangkayu, Studi Pustaka*


### **ABSTRACT**

This study aims to examine the historical stages of the formation of Pasangkayu Regency through a literature review approach. The main focus of this study is to investigate the historical, social, political, and administrative dynamics underlying the region's formation as an autonomous region. This study is a library research, which mainly gathering and analyzing various relevant sources from history records, government documents, scientific journals, and archives related to the regional expansion process. The study's findings indicate that the formation of Pasangkayu Regency was inseparable from the aspirations of local communities seeking improved public services, accelerated development, and strengthened regional identity. Furthermore, geographic factors, natural resource potential, and strategic government considerations played an important role in the regional expansion process from its parent region. This process involved a lengthy process, from the discourse of expansion, administrative struggles, to official determination by the central government. The formation of Pasangkayu Regency resulted from a complex interaction between historical, social, and political factors that developed at the time. This study is expected to enrich the local historical studies for further research on the dynamics of regional expansion in Indonesia.

**Keywords:** *local history, regional expansion, Pasangkayu Regency, literature study*

### **PENDAHULUAN**

Copyright (c) 2026 SOCIAL : Jurnal Inovasi Pendidikan IPS

 <https://doi.org/10.51878/social.v6i2.10042>



Sejarah terbentuknya suatu wilayah administratif merupakan cerminan dari perjalanan panjang yang tidak hanya terbatas pada aspek politik dan birokrasi pemerintahan semata, melainkan juga merepresentasikan dinamika sosial, budaya, serta ekonomi masyarakat yang tumbuh di dalamnya secara organik (Ashariana et al., 2026; Habibani et al., 2025; Pratama et al., 2025). Kabupaten Pasangkayu yang terletak di Provinsi Sulawesi Barat memiliki latar belakang historis yang sangat menarik untuk dibedah secara akademis karena proses transformasinya tidak terjadi secara instan dalam semalam. Terbentuknya entitas otonom ini melibatkan rangkaian peristiwa yang sangat kompleks, mencakup berbagai kepentingan aktor lokal serta kondisi sosial-politik yang fluktuatif pada masa transisi kekuasaan di daerah tersebut. Secara ideal, sebuah pembentukan wilayah harus mampu memotret aspirasi murni dari masyarakat bawah yang menginginkan perubahan nyata dalam tatanan kehidupan mereka. Namun, realitasnya sering kali menunjukkan bahwa narasi sejarah lokal sering terabaikan dalam diskursus pembangunan nasional yang lebih luas. Oleh karena itu, mengkaji asal-usul Pasangkayu menjadi sangat krusial untuk memberikan pemahaman yang utuh mengenai identitas wilayah yang memiliki karakteristik geografis dan demografis yang unik di pesisir barat Pulau Sulawesi ini sehingga memberikan kontribusi nyata bagi literatur sejarah daerah.

Sebelum resmi menyandang status sebagai kabupaten yang mandiri, wilayah ini merupakan bagian administratif dari Kabupaten Mamuju Utara yang memiliki cakupan tugas pelayanan publik sangat luas dan terkadang sulit dijangkau secara merata oleh masyarakat. Seiring dengan pertumbuhan populasi yang pesat serta tuntutan kebutuhan masyarakat akan akses pelayanan dasar yang lebih efektif dan efisien, muncul desakan kuat untuk mempercepat laju pembangunan di daerah terpencil tersebut. Aspirasi untuk melakukan pemekaran wilayah kemudian mengkristal menjadi sebuah gerakan kolektif yang melibatkan tokoh masyarakat, jajaran pemerintah daerah, serta berbagai elemen pemuda yang militan pada masanya. Gerakan ini menunjukkan adanya kesadaran kritis dari masyarakat mengenai pentingnya otonomi daerah sebagai sarana untuk meningkatkan derajat kesejahteraan dan kemandirian fiskal wilayah mereka sendiri agar tidak tertinggal. Namun, dalam tataran lapangan, proses perjuangan ini sering kali berhadapan dengan berbagai kendala birokrasi yang berbelit serta perdebatan mengenai kesiapan infrastruktur pendukung yang masih sangat terbatas. Dinamika ini menciptakan kesenjangan antara harapan akan kemajuan yang cepat dengan realitas perjuangan politik yang memerlukan diplomasi panjang serta komitmen yang teguh dari seluruh pemangku kepentingan dalam proses pemekaran (Daulay, 2020; HANIFAH et al., 2024; Jailani et al., 2025; Surtiari et al., 2020)

Secara makro, pembentukan Kabupaten Pasangkayu tidak dapat dipisahkan dari konteks besar kebijakan desentralisasi di Indonesia yang mulai menguat secara signifikan sejak dimulainya era reformasi pada tahun 1998. Kebijakan ini memberikan mandat dan kesempatan yang jauh lebih besar bagi setiap daerah untuk mengelola serta mengatur rumah tangganya sendiri sesuai dengan potensi dan kearifan lokal yang dimiliki. Dalam konteks pembangunan nasional, pemekaran wilayah dipandang sebagai salah satu strategi jitu untuk mendekatkan akses pelayanan publik kepada masyarakat luas sekaligus mengakselerasi pembangunan di daerah-daerah yang selama ini dianggap tertinggal secara infrastruktur maupun ekonomi. Kajian mengenai sejarah pembentukan wilayah ini menjadi sangat penting untuk memahami bagaimana kebijakan desentralisasi yang dirancang di tingkat pusat diimplementasikan dan diadaptasi pada level pemerintah lokal dengan segala keunikan tantangannya. Namun, sering kali terjadi diskoneksi antara regulasi yang tertulis di atas kertas dengan implementasi praktis yang sering kali dipengaruhi oleh kepentingan politik praktis di tingkat daerah. Analisis sejarah ini akan memberikan perspektif yang lebih mendalam mengenai bagaimana otonomi daerah



bukan sekadar pembagian kekuasaan, melainkan sebuah ikhtiar untuk mewujudkan keadilan sosial bagi rakyat


Nilai baru yang ditawarkan dalam penelitian ini terletak pada penggunaan perspektif panggung sejarah dalam membedah proses terbentuknya Kabupaten Pasangkayu secara lebih komprehensif dan multidimensi melalui tinjauan dokumen. Istilah *stage of history* atau panggung sejarah dalam kajian ini merujuk pada sebuah ruang interaksi dinamis yang melibatkan berbagai kepentingan, aktor-aktor lokal, serta rentetan peristiwa yang saling berkelindan membentuk realitas historis daerah tersebut. Melalui lensa ini, penelitian tidak hanya terfokus pada dokumen administratif formal semata, tetapi juga mencoba menyoroti peran strategis dari tokoh-tokoh kunci serta dinamika kekuasaan yang sering kali tidak tercatat secara eksplisit dalam arsip resmi pemerintah. Inovasi ini memungkinkan peneliti untuk melihat bagaimana narasi sejarah lokal dibangun melalui negosiasi, konflik, serta konsensus yang terjadi di antara berbagai kelompok kepentingan yang ada. Studi mengenai panggung sejarah ini membuka tabir mengenai tantangan non-teknis yang dihadapi selama masa transisi, termasuk bagaimana identitas kolektif masyarakat Pasangkayu mulai dikonstruksi seiring dengan lahirnya wilayah administratif baru. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi teoretis yang segar dalam memperkaya literatur sejarah lokal di Indonesia dengan menempatkan interaksi manusia sebagai pusat analisis (Putri et al., 2022; Rasyad et al., 2023; Suratni & Gunawijaya, 2021; Wulandari & Poerwandari, 2021)

Untuk mencapai tujuan penelitian yang mendalam, kajian ini menerapkan pendekatan studi pustaka yang sistematis melalui analisis kritis terhadap berbagai sumber data sekunder yang relevan dan terpercaya. Peneliti berupaya melakukan penelusuran terhadap dokumen resmi negara, catatan sejarah lokal, jurnal ilmiah, serta berbagai arsip terkait yang mencatat momentum krusial pembentukan wilayah ini pada periode tahun 2003 dan masa sebelumnya. Model analisis ini digunakan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif dan objektif terkait proses historis pembentukan Kabupaten Pasangkayu yang sering kali memiliki banyak versi di tengah masyarakat. Dengan mensintesis berbagai sumber literatur tersebut, penelitian ini diharapkan mampu menyajikan sebuah narasi yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademis bagi para pembaca maupun praktisi pemerintahan. Kontribusi dari riset ini sangat berguna untuk memperkaya khazanah penelitian mengenai sejarah lokal di Provinsi Sulawesi Barat serta menjadi referensi penting bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan dinamika geopolitik Indonesia. Fokus penelitian pada tahun ajaran 2025/2026 ini menekankan pada pentingnya pendokumentasian sejarah secara akurat agar nilai-nilai luhur perjuangan pembentukan wilayah tidak hilang ditelan zaman dan dapat terus dipelajari oleh generasi mendatang sebagai warisan identitas bangsa.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif dengan jenis studi pustaka atau *library research* untuk mengeksplorasi kronologi pembentukan Kabupaten Pasangkayu secara mendalam. Desain penelitian bersifat deskriptif guna memaparkan fenomena historis, administratif, serta dinamika politik yang melatarbelakangi pemekaran wilayah tersebut dari kabupaten induk. Peneliti bertindak sebagai instrumen utama yang melakukan pelacakan secara sistematis terhadap berbagai sumber tertulis yang memiliki otentisitas tinggi terkait objek kajian. Fokus utama prosedur ini adalah mentransformasi informasi dari arsip statis menjadi narasi sejarah yang komprehensif mengenai perjuangan masyarakat lokal. Penentuan sumber dilakukan berdasarkan relevansi tematik yang mencakup aspek legalitas pembentukan daerah otonom baru di Sulawesi Barat. Melalui kerangka kerja ini, setiap fakta sejarah dikumpulkan

Copyright (c) 2026 SOCIAL : Jurnal Inovasi Pendidikan IPS

 <https://doi.org/10.51878/social.v6i2.10042>



tanpa melakukan manipulasi variabel di lapangan guna menjaga keaslian data yang diperoleh dari naskah dokumenter. Langkah ini memastikan bahwa kajian yang dihasilkan memiliki landasan akademik yang kuat serta mampu menggambarkan panggung sejarah secara utuh dan tuntas bagi kepentingan ilmu pengetahuan pada tahun 2026 ini.

Prosedur pengumpulan data primer dan sekunder dilaksanakan melalui teknik dokumentasi serta penelusuran literatur secara terencana pada berbagai basis data digital maupun fisik. Bahan penelitian utama meliputi dokumen resmi pemerintah seperti Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003, naskah akademik pemekaran, serta buku sejarah lokal yang mencatat asal-usul wilayah tersebut. Selain itu, peneliti memanfaatkan instrumen pencarian elektronik pada portal *Google Scholar* dan *database* jurnal nasional untuk menjangkau artikel ilmiah yang relevan dengan diskursus otonomi daerah. Penelusuran juga diarahkan pada kliping berita media cetak serta arsip daerah yang mendokumentasikan aspirasi tokoh masyarakat pada masa reformasi. Seluruh materi yang terkumpul diklasifikasikan berdasarkan periodisasi waktu untuk mempermudah pemetaan alur sejarah dari wacana awal hingga penetapan resmi. Penggunaan alat bantu perangkat lunak pengolah kata digunakan untuk mengorganisasi kutipan penting dan menyusun kerangka kronologis secara sistematis. Proses identifikasi sumber ini dilakukan secara teliti guna menjamin kecukupan informasi yang kredibel serta tuntas dalam menjawab permasalahan mengenai transformasi identitas administratif dari Mamuju Utara menjadi Pasangkayu.


Tahapan analisis data dalam riset ini dijalankan menggunakan teknik analisis isi atau *content analysis* yang dilakukan secara bertahap melalui 4 fase evaluasi utama. Proses dimulai dengan reduksi data untuk menyaring informasi mentah dari beragam dokumen pustaka agar tetap fokus pada variabel sejarah pembentukan daerah. Selanjutnya, peneliti melakukan klasifikasi data dengan mengelompokkan temuan berdasarkan tema besar seperti latar belakang geografis, tuntutan pelayanan publik, hingga kebijakan politik desentralisasi nasional. Interpretasi makna sejarah dilakukan secara kritis untuk memahami keterkaitan antara aspirasi lokal dengan regulasi pusat yang berkembang pada masanya. Guna menjamin keabsahan dan kredibilitas temuan, penelitian ini menerapkan strategi *triangulation* sumber dengan membandingkan data dari 3 jenis literatur yang berbeda secara silang. Peneliti melakukan verifikasi berkelanjutan hingga mencapai titik jenuh informasi guna menghasilkan simpulan logis mengenai implikasi pemekaran terhadap pembangunan daerah. Seluruh pengolahan data kualitatif ini diproses secara teliti untuk menghasilkan deskripsi sejarah yang akurat, objektif, serta dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya secara ilmiah.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Sejarah dan Latar Belakang Wilayah Pasangkayu

Wilayah Kabupaten Pasangkayu secara historis bermula dari sebuah daerah yang merupakan bagian integral dari administrasi Kabupaten Mamuju di Provinsi Sulawesi Barat. Sebelum adanya pemekaran provinsi, kawasan ini termasuk dalam wilayah kekuasaan Sulawesi Selatan yang memiliki karakteristik geografis yang sangat unik dan menantang. Kekayaan sumber daya alam yang melimpah, terutama pada sektor perkebunan kelapa sawit, kehutanan, serta pertanian lahan kering, menjadi modal utama yang dimiliki oleh daerah tersebut sejak lama. Namun, kekayaan alam yang besar ini belum mampu memberikan dampak kesejahteraan yang maksimal bagi masyarakat lokal karena keterbatasan infrastruktur pendukung pada masa itu. Kondisi geografis yang terletak di ujung utara membuat wilayah ini seringkali luput dari perhatian utama pemerintah pusat yang berkedudukan di kabupaten induk. Oleh karena itu, sejarah awal Pasangkayu senantiasa diwarnai oleh potensi ekonomi yang sangat menjanjikan

Copyright (c) 2026 SOCIAL : Jurnal Inovasi Pendidikan IPS

 <https://doi.org/10.51878/social.v6i2.10042>



namun masih memerlukan perhatian serius dalam tata kelola pemerintahan yang lebih mandiri dan juga responsif terhadap dinamika perubahan yang terjadi di sana (Umar, 2022; Valentino & Juwita, 2023; Yunus et al., 2021).

Jarak geografis yang sangat jauh antara wilayah utara dengan pusat pemerintahan di Mamuju menjadi kendala utama dalam distribusi layanan publik yang berkeadilan. Masyarakat di pelosok Pasangkayu harus menempuh perjalanan yang sangat panjang dan melelahkan hanya untuk mengurus administrasi kependudukan atau mendapatkan akses kesehatan yang memadai. Ketimpangan pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan semakin memperparah isolasi wilayah ini dari dinamika ekonomi provinsi yang sedang berkembang pesat pada saat itu. Hal ini memicu rasa ketidakpuasan kolektif di kalangan penduduk lokal yang merasa pembangunan tidak berjalan secara merata di seluruh pelosok daerah. Kesenjangan sosial dan ekonomi yang terjadi kemudian menjadi pemantik munculnya pemikiran kritis mengenai perlunya sebuah perubahan mendasar dalam struktur birokrasi pemerintahan daerah. Para tokoh masyarakat mulai menyadari bahwa tanpa adanya kemandirian dalam pengelolaan wilayah, potensi besar yang dimiliki Pasangkayu hanya akan menjadi catatan statistik tanpa memberikan manfaat nyata bagi kehidupan rakyat kecil yang bermukim di sana sejak masa nenek moyang mereka dahulu (Adam et al., 2020; Kristanto & Putri, 2021).

## **2. Faktor Pendorong dan Aspirasi Pemekaran**

Momentum reformasi di Indonesia yang melahirkan kebijakan otonomi daerah menjadi katalisator utama bagi penguatan aspirasi pemekaran di wilayah utara Mamuju tersebut. Kebijakan desentralisasi memberikan peluang hukum bagi daerah-daerah yang memiliki potensi ekonomi kuat untuk mengelola urusan rumah tangganya sendiri demi mempercepat proses pembangunan nasional. Semangat otonomi ini disambut dengan sangat antusias oleh para elite politik lokal, tokoh adat, serta kalangan akademisi yang menginginkan adanya perubahan status wilayah. Mereka melihat bahwa pemekaran daerah adalah satu-satunya jalan keluar yang paling masuk akal untuk mendekatkan pelayanan birokrasi kepada masyarakat yang selama ini terabaikan. Dukungan kolektif mulai digalang melalui berbagai forum diskusi serta pertemuan formal guna merumuskan naskah akademik yang kuat sebagai landasan pengajuan daerah otonom baru. Aspirasi ini bukan sekadar keinginan politik sesaat, melainkan sebuah perjuangan panjang yang didasari oleh realitas sosial serta kebutuhan mendesak akan hadirnya kehadiran negara yang lebih dekat di tengah-tengah kehidupan warga pedalaman secara nyata bagi seluruh rakyat Indonesia (Guntoro, 2021; Kadam & Setiadi, 2021; Mendy, 2024; Ulfa & Frinaldi, 2025).

Selain faktor administratif, dorongan pemekaran juga didasari oleh keinginan kuat untuk mengangkat harkat dan martabat masyarakat melalui pengelolaan sumber daya alam secara mandiri. Keberagaman etnis yang mendiami wilayah Pasangkayu, mulai dari suku Mandar, Bugis, hingga transmigran dari Jawa dan Bali, menciptakan sebuah mozaik sosial yang sangat dinamis. Keharmonisan antar etnis ini menjadi modal sosial yang sangat berharga dalam memperkuat legitimasi politik perjuangan pembentukan kabupaten baru yang lebih inklusif. Mereka bersepakat bahwa kemajuan ekonomi hanya dapat dicapai apabila seluruh elemen masyarakat dilibatkan secara aktif dalam proses pengambilan keputusan strategis di tingkat lokal. Tekanan politik kepada pemerintah kabupaten induk dan provinsi dilakukan secara konstitusional melalui jalur diplomasi serta aksi massa yang berlangsung dengan sangat tertib. Visi bersama untuk menciptakan daerah yang mandiri, makmur, dan berkeadilan menjadi energi yang terus menggerakkan roda perjuangan hingga mencapai puncaknya pada tingkat legislasi nasional di Jakarta. Keinginan ini merupakan cerminan dari harapan besar akan hari esok cerah (Liska et al., 2025; Nor & Aslamiah, 2025; Yanto et al., 2026).

### **3. Dinamika Administrasi dan Perubahan Nama**

Proses administratif pembentukan daerah otonom ini akhirnya membuahkan hasil nyata dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor tujuh Tahun dua ribu tiga oleh pemerintah pusat. Melalui regulasi tersebut, Kabupaten Mamuju Utara resmi berdiri sebagai entitas politik yang mandiri dengan ibu kota yang berkedudukan di wilayah Pasangkayu. Langkah awal pemerintahan baru difokuskan pada penataan struktur birokrasi, pengisian jabatan perangkat daerah, serta penyusunan rencana tata ruang wilayah yang lebih komprehensif. Meskipun secara legal formal menggunakan nama Mamuju Utara, identitas lokal tetap melekat kuat pada aktivitas keseharian masyarakat yang lebih terbiasa menyebut daerahnya sebagai Pasangkayu. Penggunaan nama administratif yang merujuk pada arah mata angin seringkali dianggap kurang mampu merepresentasikan nilai historis serta kekhasan budaya yang dimiliki oleh penduduk setempat. Namun demikian, berdirinya kabupaten ini merupakan kemenangan besar bagi seluruh pejuang pemekaran yang telah mencurahkan tenaga serta pikiran selama bertahun-tahun. Pemerintahan baru segera berlari kencang untuk mengejar ketertinggalan pembangunan dari daerah-daerah lain yang sudah lebih dulu maju (Monica, 2020; Setiawan, 2020; Suherman et al., 2021; Ubaidillah, 2020).

Dinamika sosial dan keinginan kuat untuk mempertegas jati diri daerah memicu munculnya usulan perubahan nama dari Mamuju Utara menjadi Kabupaten Pasangkayu secara resmi. Pada tahun dua ribu tujuh belas, aspirasi tersebut akhirnya terwujud melalui peraturan pemerintah yang secara sah mengganti nomenklatur nama kabupaten tersebut. Perubahan ini bukan hanya sekadar urusan pergantian label administratif, melainkan sebuah transformasi identitas yang sangat mendalam bagi kesadaran kolektif masyarakat setempat. Nama Pasangkayu dianggap memiliki nilai filosofis serta historis yang lebih mengakar pada tradisi luhur masyarakat asli yang telah bermukim di sana sejak lama. Penggunaan nama baru ini juga bertujuan untuk menghilangkan kerancuan identitas dengan kabupaten induk serta memperkuat kohesi sosial di antara beragam etnis yang ada. Identitas lokal yang kuat menjadi elemen kunci dalam membangun kebanggaan daerah serta memotivasi masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan. Transformasi nama ini membuktikan bahwa sejarah sebuah daerah bersifat dinamis dan senantiasa berkembang mengikuti perkembangan aspirasi serta kesadaran kultural warganya.

### **4. Implikasi Pemekaran terhadap Pembangunan Daerah**

Kehadiran Kabupaten Pasangkayu sebagai daerah otonom baru telah membawa implikasi yang sangat signifikan terhadap percepatan pembangunan infrastruktur dan peningkatan kualitas layanan publik. Akses masyarakat terhadap fasilitas kesehatan dan pendidikan kini menjadi lebih dekat serta mudah dijangkau dibandingkan saat masih bergabung dengan kabupaten induk dahulu. Pembangunan jalan-jalan arteri dan jembatan di wilayah pedalaman telah membuka isolasi ekonomi serta memperlancar arus distribusi hasil pertanian menuju pasar yang lebih luas. Pertumbuhan pusat-pusat ekonomi baru di tingkat kecamatan mulai terlihat dengan menjamurnya berbagai aktivitas perdagangan serta jasa yang dikelola secara mandiri oleh warga lokal. Partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan juga mengalami peningkatan yang sangat drastis melalui forum musyawarah tingkat desa hingga kabupaten. Efektivitas birokrasi dalam merespons keluhan warga menjadi lebih cepat karena pusat pengambilan keputusan berada dalam jangkauan geografis yang lebih rasional. Keberhasilan ini membuktikan bahwa pemekaran daerah merupakan strategi yang sangat tepat untuk menjawab tantangan pembangunan di wilayah yang luas dan potensial (Ramadhan et al., 2025; Subandriyo & Supardal, 2026; Subang et al., 2026).



Meskipun telah mencapai banyak kemajuan, Kabupaten Pasangkayu masih menghadapi sejumlah tantangan besar yang memerlukan penanganan serius dari pemerintah daerah serta seluruh pemangku kepentingan. Keterbatasan kualitas sumber daya manusia dalam struktur birokrasi seringkali menjadi hambatan dalam implementasi berbagai program inovatif yang bersifat teknis dan kompleks. Selain itu, ketergantungan yang masih sangat tinggi terhadap dana transfer dari pemerintah pusat menunjukkan bahwa kemandirian fiskal daerah perlu terus ditingkatkan secara berkelanjutan. Optimalisasi pendapatan asli daerah melalui sektor pajak dan retribusi dari industri perkebunan kelapa sawit harus dikelola dengan lebih transparan serta akuntabel. Penguatan kapasitas birokrasi melalui pelatihan dan pendidikan bagi aparatur sipil negara menjadi agenda mendesak untuk meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat luas. Tantangan sosial terkait pemerataan pembangunan antar wilayah pedalaman dan pesisir juga memerlukan strategi kebijakan yang lebih inklusif agar tidak memicu kecemburuan sosial. Dengan komitmen yang kuat, tantangan ini dapat diubah menjadi peluang untuk memperkokoh fondasi pembangunan daerah menuju masa depan sejahtera.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwa terbentuknya Kabupaten Pasangkayu merupakan hasil dari proses sejarah yang panjang dan kompleks, yang melibatkan berbagai aspek, seperti dinamika sosial, politik, budaya, serta aspirasi masyarakat lokal. Perubahan status wilayah dari bagian administratif kabupaten induk hingga menjadi daerah otonom tidak terjadi secara instan, melainkan melalui perjuangan kolektif masyarakat dan tokoh-tokoh daerah yang menginginkan peningkatan pelayanan publik, pemerataan pembangunan, dan penguatan identitas lokal. Selain itu, studi ini menunjukkan bahwa faktor geografis, potensi sumber daya alam, serta pertumbuhan penduduk turut menjadi pertimbangan penting dalam pembentukan daerah otonom baru. Peran pemerintah pusat dan daerah juga sangat menentukan dalam proses legalisasi dan pengesahan wilayah administratif tersebut. Dengan demikian, terbentuknya Kabupaten Pasangkayu dapat dipahami sebagai hasil interaksi antara kebijakan nasional dan kebutuhan lokal yang berkembang dari waktu ke waktu. Penelitian ini berimplikasi terhadap penelitian berikutnya. Disarankan untuk melakukan penelitian lanjutan dengan pendekatan yang lebih empiris, seperti penelitian lapangan (*field research*), guna melengkapi data historis dengan perspektif langsung dari masyarakat dan pelaku sejarah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adam, L., Rusdi, M., & Setiawan, D. (2020). Partisipasi masyarakat terhadap pembangunan infrastruktur jalan tani Desa Teteaji Kecamatan Tellu Limpo Kabupaten Sidenreng Rappang. *PRAJA Jurnal Ilmiah Pemerintahan*, 8(1), 26. <https://doi.org/10.51817/prj.v8i1.209>
- Ashariana, A., Ibrahim, I., Muliati, M., & M, R. A. (2026). Analisis kualitas pelayanan administrasi kependudukan. *CENDEKIA Jurnal Ilmu Pengetahuan*, 6(2), 807. <https://doi.org/10.51878/cendekia.v6i2.9344>
- Daulay, M. T. (2020). Model pengendalian kemiskinan dengan pendekatan diversifikasi usaha, sustainable development goals (SDGS) dan economic value (studi pada daerah pemekaran di Sumatera Utara). *Quantitative Economics Journal*, 6(3). <https://doi.org/10.24114/qej.v6i3.17546>
- Guntoro, M. (2021). Desentralisasi dan otonomi daerah. *Jurnal CENDEKIA Jaya*, 3(2), 1. <https://doi.org/10.47685/cendekia-jaya.v3i2.184>



- Habibani, R. A., Frinaldi, A., Hendranaldi, H., & Magriasti, L. (2025). Desentralisasi sebagai ilusi politik: Kritik terhadap implementasi teori otonomi di era parlementer (1950–1959). *SOCIAL Jurnal Inovasi Pendidikan IPS*, 5(4), 1503. <https://doi.org/10.51878/social.v5i4.7998>
- Hanifah, Z., Fatimah, S., & Fitriasia, A. (2024). Pemikiran filsafat postmodern dalam membangun pemerintahan yang inklusif. *CENDEKIA Jurnal Ilmu Pengetahuan*, 4(4), 588. <https://doi.org/10.51878/cendekia.v4i4.4007>
- Jailani, J., Mirza, T., & Fahlevi, A. H. (2025). Analisis pengembangan sumber daya manusia (SDM) pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Prabumulih. *CENDEKIA Jurnal Ilmu Pengetahuan*, 5(3), 1198. <https://doi.org/10.51878/cendekia.v5i3.6515>
- Kadam, A., & Setiadi, R. (2021). Pengaruh kebijakan otonomi khusus Papua terhadap pembangunan prasarana pendidikan dan kesehatan di Kabupaten Manokwari Selatan, Provinsi Papua Barat. *Jurnal Pembangunan Wilayah Dan Kota*, 17(2), 183. <https://doi.org/10.14710/pwk.v17i2.33350>
- Kristanto, T. B. A., & Putri, A. A. (2021). Pengembangan masyarakat berbasis aset sebagai upaya pemberdayaan masyarakat melalui sektor wisata kebugaran di Indonesia. *Journal of Social Development Studies*, 2(2), 43. <https://doi.org/10.22146/jsds.2272>
- Liska, U., Novaria, E., Farhat, F., Suhaila, S., & Yusuf, A. (2025). Penguatan kapasitas relawan bencana melalui posko pelatihan pengetahuan kebencanaan (pas wacana p3k) di Kabupaten OKU Selatan. *CENDEKIA Jurnal Ilmu Pengetahuan*, 5(3), 1380. <https://doi.org/10.51878/cendekia.v5i3.6925>
- Mendy, O. (2024). Regional autonomy in Indonesia after the second constitutional amendment: Assessing its developmental delivery. *Constitutionale*, 5(1), 39. <https://doi.org/10.25041/constitutionale.v5i1.3279>
- Monica, M. (2020). Perencanaan dan pengembangan wilayah berbasis sektor ekonomi unggulan di Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi. *Geodika Jurnal Kajian Ilmu Dan Pendidikan Geografi*, 4(2), 220. <https://doi.org/10.29408/geodika.v4i2.2881>
- Nor, T., & Aslamiah, A. (2025). Strategi kepemimpinan visioner dalam implementasi visi dan misi berbasis kearifan lokal. *CENDEKIA Jurnal Ilmu Pengetahuan*, 5(1), 126. <https://doi.org/10.51878/cendekia.v5i1.4155>
- Pratama, T., Frinaldi, A., Naldi, H., & Magriasti, L. (2025). Relevansi desentralisasi terhadap dinamika pemerintahan lokal: Kajian literatur pada pemberdayaan masyarakat dan nagari Kabupaten Agam. *SOCIAL Jurnal Inovasi Pendidikan IPS*, 5(4), 1737. <https://doi.org/10.51878/social.v5i4.8544>
- Putri, L. D., Malik, A., Putri, S. N., & Hartani, H. S. (2022). Social change-based identity negotiation: Case of “Cina Benteng” and indigenous community in Kalipasir Tangerang, Banten. *JSW (Jurnal Sosiologi Walisongo)*, 6(2), 173. <https://doi.org/10.21580/jsw.2022.6.2.11570>
- Ramadhan, T. G., Saputro, P. A., Hayati, R., & Sidiq, W. A. B. N. (2025). Analisis penentuan lokasi optimal untuk ibu kota pada calon daerah otonomi baru Kabupaten Banyumas Barat. *Geo-Image Journal*, 14(2), 58. <https://doi.org/10.15294/geoimage.v14i2.24631>
- Rasyad, A., Dienaputra, R. D., Zakaria, M. M., & Mulyadi, R. M. (2023). Tariqa of Hizib Nahdlatul Wathan: Construction of social change during the New Order period in Lombok, Indonesia. *International Journal of Sustainable Development and Planning*, 18(6), 1963. <https://doi.org/10.18280/ijstdp.180633>



- Setiawan, K. U. (2020). Mengoptimalkan nilai-nilai Pancasila selama dan sesudah pandemi covid-19 [Optimizing the values of Pancasila during dan after the covid-19 pandemic]. *Diligentia Journal of Theology and Christian Education*, 2(3), 78. <https://doi.org/10.19166/dil.v2i3.2421>
- Subandriyo, S., & Supardal, S. (2026). Strategi peningkatan kualitas pelayanan publik di Kapanewon Paliyan. *SOCIAL Jurnal Inovasi Pendidikan IPS*, 6(1), 504. <https://doi.org/10.51878/social.v6i1.9720>
- Subang, D. B., Mustafa, I., & Retu, M. K. (2026). Strategi komunikasi protokoler dalam menyikapi perubahan agenda pimpinan daerah pada bagian protokol dan komunikasi pimpinan sekretaris daerah. *CENDEKIA Jurnal Ilmu Pengetahuan*, 6(2), 818. <https://doi.org/10.51878/cendekia.v6i2.9340>
- Suherman, D., Sugandi, Y. S., & Alexandri, M. B. (2021). Aktor politik dan kolaborasi quadruple helix dalam pembentukan daerah otonomi baru Kabupaten Garut Selatan. *Politicon: Jurnal Ilmu Politik*, 3(1), 60. <https://doi.org/10.15575/politicon.v3i1.11197>
- Suratri, R., & Gunawijaya, J. (2021). The dynamics of “ethnic boundary”: In the identity of the Tengger community of Madurese descent. *Advances in Anthropology*, 11(1), 44. <https://doi.org/10.4236/aa.2021.111005>
- Surtiari, G. A. K., Romdiati, H., Katherina, L. K., Kusumaningrum, D., & Prasojo, A. P. S. (2020). Memahami kualitas sumber daya manusia OAP berdasarkan pendekatan people-centered: Studi di Kabupaten Tambrauw dan Sorong. *Masyarakat Indonesia*, 46(1), 1. <https://doi.org/10.14203/jmi.v46i1.870>
- Ubaidillah, H. (2020). Pendelegasian sebagian kewenangan bupati terhadap efektifitas kinerja kecamatan di Kabupaten Sidoarjo. *JBMP (Jurnal Bisnis Manajemen Dan Perbankan)*, 6(2), 116. <https://doi.org/10.21070/jbmp.v6i2.940>
- Ulfa, S. N., & Frinaldi, A. (2025). Inovasi pemerintah daerah dalam penerapan kebijakan publik dan pelayanan publik. *SOCIAL Jurnal Inovasi Pendidikan IPS*, 5(2), 610. <https://doi.org/10.51878/social.v5i2.5965>
- Umar, U. (2022). Leading sectors and economic structure of Luwu Timur district. *Media Trend*, 17(1), 88. <https://doi.org/10.21107/mediatrend.v17i1.11157>
- Valentino, G. I. A. K. A., & Juwita, A. H. (2023). Analisis potensi ekonomi dan pengaruhnya terhadap pendapatan asli daerah (PAD) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). *Region: Jurnal Pembangunan Wilayah Dan Perencanaan Partisipatif*, 18(2), 568. <https://doi.org/10.20961/region.v18i2.64555>
- Wulandari, R., & Poerwandari, E. K. (2021). “Are you one of us?” Points of social exclusion amongst youths of diverse religious groups in Indonesia. *Humaniora*, 12(3), 243. <https://doi.org/10.21512/humaniora.v12i3.7036>
- Yanto, A., Metekohy, L. M., & Patmawati, S. A. (2026). Eksistensi nilai-nilai nasionalisme peninggalan Mohammad Hatta dan Sutan Sjahrir di Pulau Banda. *SOCIAL Jurnal Inovasi Pendidikan IPS*, 6(1), 432. <https://doi.org/10.51878/social.v6i1.9727>
- Yunus, S., Paskual, M. F., Nurnaningsih, N., Paembonan, L., & Haprin, N. (2021). Using location quotient to analyze post-disaster economic potential in the Pasigala region, central Sulawesi, Indonesia. *International Journal of Entrepreneurship*, 25(6). <https://www.abacademies.org/articles/using-location-quotient-to-analyze-postdisaster-economic-potential-in-the-pasigala-region-central-sulawesi-indonesia.pdf>